

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja modal Kabupaten Malaka tahun 2019–2024, maka dapat disimpulkan bahwa :

Selama periode 2019–2024, efisiensi alokasi belanja modal di Kabupaten Malaka menunjukkan capaian yang bervariasi namun umumnya berada pada kategori efisien hingga sangat efisien. Pada tahun 2019 hingga 2021, efisiensi tergolong sangat efisien karena realisasi anggaran relatif rendah dibanding alokasi, mencerminkan pengendalian belanja yang ketat, meskipun berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan efisiensi yang mulai menurun ke kategori cukup efisien, dengan realisasi anggaran yang meningkat dan mendekati alokasi, menandakan kegiatan pembangunan mulai berjalan lebih optimal, namun ruang penghematan mulai terbatas. Secara keseluruhan, belanja modal telah dikelola cukup efisien, namun tetap membutuhkan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan agar efisiensi anggaran benar-benar menghasilkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan

5.2 Implikasi Teori

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori-teori dalam pengelolaan keuangan daerah. Implikasi teori dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian juga menguatkan teori Halim (2007) yang menyatakan bahwa efisiensi belanja daerah diukur dari kemampuan pemerintah dalam membelanjakan dana sesuai dengan kapasitas keuangan yang dimiliki tanpa pemborosan. Efisiensi yang berfluktuasi dan bahkan melebihi 100% di beberapa tahun menunjukkan bahwa pengendalian anggaran masih perlu diperkuat.
2. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Intan Lidia Putri dan Vivi (2024) di Kabupaten Sambas, yang membuktikan bahwa efektivitas realisasi anggaran belanja modal berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur. Kesesuaian antara rencana program dan realisasi anggaran menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan fisik di daerah.
3. Temuan dalam penelitian ini memperkuat pandangan Mahmudi (2010) bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik tidak hanya berarti hemat, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang maksimal. Dalam konteks belanja modal, efisiensi yang terlalu tinggi dapat menjadi sinyal bahwa program tidak berjalan atau pembangunan tertunda, sedangkan efisiensi yang terlalu rendah berisiko pada pemborosan. Oleh karena itu, teori efisiensi anggaran perlu diterapkan secara kontekstual, yaitu mempertimbangkan kesesuaian antara realisasi anggaran dan pencapaian output pembangunan.
4. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung kerangka teori Mardiasmo (2018) yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan value for money

dalam pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi belanja modal yang tercapai sebagian besar tahun anggaran menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, dan efektif (3E) tetap relevan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi anggaran pembangunan, khususnya dalam sektor infrastruktur yang memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat.

5.3 Implikasi Terapan

Hasil penelitian ini memiliki implikasi terapan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan keuangan daerah. Implikasi tersebut antara lain:

Capaian efisiensi alokasi belanja modal yang bervariasi setiap tahun menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pengendalian anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Ketika efisiensi tergolong sangat tinggi, hal tersebut mencerminkan kemampuan dalam mengelola belanja secara hemat. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi tersebut tidak disebabkan oleh tertundanya pelaksanaan program atau tidak terserapnya anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, pada tahun-tahun dengan efisiensi yang mendekati batas maksimal, penting untuk meningkatkan pengawasan agar penggunaan anggaran tetap terkendali dan tidak hanya berfokus pada penyerapan, tetapi benar-benar menghasilkan output pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam perencanaan dan evaluasi belanja daerah dengan menjadikan efisiensi sebagai salah satu indikator penilaian kinerja anggaran. Dengan menjaga efisiensi belanja modal pada batas yang sehat dan disertai pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malaka dapat berjalan lebih optimal, merata, dan berkelanjutan.